

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

##### **2.1.1 Modal Sosial**

Konsep modal sosial timbul dari gagasan bahwa anggota masyarakat tidak mungkin mampu menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi sendiri. Dibutuhkan solidaritas dan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Pemikiran seperti inilah yang menginspirasi pendidik di Amerika Serikat, Lyda Judson Hanifan, untuk pertama kali memperkenalkan konsep modal sosial pada awal abad 20. Dalam artikelnya yang berjudul "*Community Center Community of Rustic School*" Hanifan menceritakan keadaan suatu desa yang terdapat hubungan sosial timbal balik dalam keluarga. Individu menghubungi keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan individu, jaringan berbasis keluarga ini juga menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan dalam memenuhi keinginan individu dalam satu kelompok keluarga. Akhirnya jaringan ini meluas hingga mencakup tetangga dan tidak lagi mementingkan kekerabatan.

#### **1. Teori Modal Sosial Menurut Para Ahli**

##### **a. Teori Modal Sosial Menurut Pandangan Pierre Bourdieu**

Pierre Bourdieu merupakan seorang sosiolog Perancis yang pemikirannya dipengaruhi oleh *Marxist Sociology*. Bourdieu mengemukakan mengenai terminologi modal yang memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu modal ekonomi, modal budaya/kultural, dan modal sosial.

### 1) Modal Ekonomi

Hasbullah (2006) mengemukakan bahwa modal ekonomi dalam pemikiran Bourdieu dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan untuk keperluan investasi. Bourdieu (1983) dalam Sudarmono (2021) menjelaskan modal ekonomi tidak hanya uang tetapi modal ekonomi dapat berwujud dalam bentuk lain seperti aset perusahaan atau suatu bentuk hak milik yang dilembagakan.

### 2) Modal Budaya/Kultural

Hasbullah (2006) menyatakan modal kultural menurut pemikiran Bourdieu (1986) adalah modal yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Menurut Bourdieu (1983) dalam Sudarmono (2021), waktu yang diperlukan untuk memperoleh modal budaya adalah hubungan antara modal budaya dan ekonomi. Bourdieu menyimpulkan bahwa:

“pendidikan akan meningkatkan biaya ekonomi secara langsung (untuk biaya sekolah atau bahan pelajaran seperti buku) dan secara tidak langsung (masa pendidikan yang lebih lama dikaitkan dengan masuknya ke pasar tenaga kerja nanti dan dengan demikian, sebagai titik awal untuk menghasilkan uang”

Menurut Sudarmono (2021) ketika menghubungkan pendidikan yang tingkatannya lebih tinggi dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, akses yang lebih tinggi ke pendidikan menyebabkan lebih banyak orang memperoleh gelar tertentu daripada yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua orang yang memiliki gelar tersebut memperoleh pekerjaan. Kondisi ini mengharuskan orang memiliki modal

sosial selain modal budaya agar mampu meningkatkan peluang untuk orang tersebut dipekerjakan.

### 3) Modal Sosial

Hasbullah (2006) menyatakan dalam pemikiran Bourdieu (1986) bahwa modal sosial yang dimaksud adalah yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dan diantaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan. Bourdieu (1986) dalam Sudarmono (2021) merumuskan definisi modal sosial sebagai berikut.

*“Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition - or in other words, to membership in a group - which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a 'credential' which entitles them to credit, in the various senses of the word”*

Secara harfiah modal sosial dapat didefinisikan sebagai

“sekumpulan-sekumpulan dari sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang tahan lama terhadap suatu hubungan yang kurang lebih dilembagakan untuk saling mengenal dan mengakui atau dengan kata lain keanggotaan dalam suatu kelompok yang menyediakan dukungan kolektivitas untuk masing-masing anggotanya, sebuah ‘kepercayaan’ yang memberi mereka hak untuk memiliki, dalam berbagai arti kata.” (Bourdieu, 1986 dalam Sudarmono, 2021)

Dari pemikiran Bourdieu yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa modal ada 3 yaitu modal ekonomi, modal kultural/budaya, dan modal sosial. Modal ekonomi dapat dikaitkan dengan uang, barang kepemilikan, aset perusahaan atau pun barang lainnya yang dapat dilembagakan dan diinvestasikan. Modal kultural atau modal budaya dikaitkan dengan hal berkualifikasi pendidikan. Dengan hal ini ternyata dibutuhkan pula modal sosial untuk memperluas akses

pasar tenaga kerja. Modal sosial sendiri adalah sumber daya dalam kepemilikan jaringan yang menyediakan dukungan untuk anggota yang di dalamnya terdapat kepercayaan sehingga ada hak yang dapat dimiliki anggota. Peneliti menyimpulkan modal sosial dapat mempermudah untuk mengakses segala hal karena sudah terbentuk sebuah kepercayaan antar satu pihak dengan pihak lain.

#### b. Teori Modal Sosial Menurut Pandangan James Coleman

James Coleman adalah seorang sosiolog Amerika yang memberikan perhatian kepada modal sosial. Sudarmono (2021) menjelaskan bahwa Coleman mengembangkan konsep dan teori modal sosial dengan menanamkan konteks dan latar teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Pada dasarnya, teori ini berakar pada keyakinan bahwa saling ketergantungan antar aktor dalam suatu sistem sosial menjadi landasan seiring dengan pemahaman bahwa kontrol terhadap sumber daya dapat dipegang oleh pihak yang berada di luar wilayah sistem sosial yang bersangkutan. Coleman (1990) dalam Hasbullah (2006) menyatakan bahwa modal sosial sebagai varian entitas terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. “Modal sosial dalam arti disini berhubungan erat dengan struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan ini menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya” (Hasbullah, 2006). Coleman menekankan konsep modal sosial pada beberapa faktor yang memengaruhi dinamika modal sosial secara menyeluruh yaitu ketertutupan, stabilitas, dan ideologi.

- 1) Konteks ketertutupan berarti mencerminkan kurangnya peluang bagi individu dari luar struktur untuk memasuki struktur internal tertentu. Ketika hubungan saktor dalam struktur tersebut terjalin dengan sangat dalam mengakibatkan aktor memiliki modal sosial yang lebih tinggi.
- 2) Stabilitas struktur sosial atau hubungan memiliki peran krusial dalam menjaga modal sosial. Gangguan dalam organisasi sosial atau hubungan sosial dapat mengakibatkan merenggangnya modal sosial.
- 3) Variabel ideologi memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hubungan sosial dan dapat memicu terbentuknya modal sosial.

Coleman (1995) dalam Sudarmono (2021) membedakan jenis-jenis modal sosial sebagai berikut.

- 1) Hubungan saling percaya  
Hubungan yang didasari oleh kepercayaan satu sama lain dapat terbentuk ketika ada interaksi timbal balik yang saling menguntungkan.
- 2) Hubungan berbasis kewenangan atau otoritas  
Hubungan ini bisa dianggap sebagai pembagian tugas, di mana satu pihak memiliki posisi lebih tinggi daripada pihak lainnya.
- 3) Hubungan berbasis kebutuhan akan informasi tertentu (potensi informasi)  
Potensi informasi artinya ada manfaat yang bisa didapat dari informasi yang beredar dalam suatu kelompok. Informasi itu jadi panduan bagi anggota kelompok untuk lebih baik dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan pribadi maupun bersama.

4) Norma Efektif

Norma yang berjalan dengan baik bisa dianggap sebagai kekuatan dalam hubungan sosial. Norma ini membantu atau memberikan dasar yang benar untuk tindakan tertentu.

5) Organisasi sosial yang sesuai dengan konteks tertentu

Organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu juga bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan lainnya, seperti halnya asosiasi sukarela yang memiliki tujuan bersama dalam lingkungannya.

Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa James Coleman meneliti tentang modal sosial dengan menggunakan teori pilihan rasional. Dengan kata sederhana, teorinya mengatakan bahwa dalam sebuah kelompok, individu saling membutuhkan sedangkan kendali atas sumber daya bisa ada di luar kelompok tersebut. Coleman menyebut modal sosial sebagai barang publik dan bedanya dengan modal fisik dan modal manusia adalah munculnya melalui perubahan dalam hubungan antar individu yang mempengaruhi tindakan. Coleman menyebutkan 3 (tiga) aspek yang kaitannya dengan modal sosial yaitu ketertutupan, stabilitas, dan ideologi. Jenis-jenis modal sosial menurut Coleman ada hubungan saling percaya, hubungan berbasis kewenangan atau otoritas, hubungan berbasis kebutuhan akan informasi tertentu, norma efektif, dan organisasi sosial yang sesuai dengan konteks tertentu. Keseluruhan menunjukkan bahwa modal sosial memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat hubungan sosial serta mencapai tujuan bersama.

### c. Teori Modal Sosial Menurut Pandangan Robert Putnam

Robert Putnam merupakan seorang ahli ilmu politik asal Amerika mendefinisikan modal sosial dalam bukunya yang berjudul *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 36) adalah: “*features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit,*” yang artinya modal sosial itu “ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama” (Syahra, 2003). Syahra (2003) mengatakan bahwa pandangan Putnam terkait modal sosial itu sebenarnya sejumlah hubungan antara individu dengan individu (hubungan horizontal). Dalam pandangan Putnam, ada dua pokok utama dalam konsep modal sosial, yaitu adanya hubungan yang terikat pada norma-norma tertentu dan dukungan saling antaranggota.

Sudarmono (2021) dalam bukunya *Pembangunan Modal Sosial* mengatakan bahwa Putnam mengembangkan konsep modal sosial mengikuti Coleman. Ide utamanya adalah bahwa jejaring sosial mengandung nilai bagi individu. Menurut Putnam (2000) dalam Sudarmono (2021) terdapat elemen-elemen modal sosial sebagai berikut.

#### 1) Kepercayaan

“Kepercayaan adalah elemen utama yang memperluas terbentuknya jaringan sosial dalam kehidupan masyarakat” (Putnam 2000). Semakin besar kepercayaan dalam sebuah komunitas, semakin besar peluang untuk

terbentuknya kerjasama yang positif. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan peningkatan rasa kepercayaan.

2) Jaringan keterlibatan sipil

Kelompok masyarakat sipil berfungsi sebagai penghubung dalam masyarakat. Mereka menjadi tempat di mana masyarakat belajar tentang demokrasi, membangun hubungan sosial, solidaritas, dan partisipasi warga.

3) Norma timbal balik (resiprositas)

Karakteristik utama dari norma-norma ini adalah adanya hubungan timbal balik yang berpotensi memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Adapun karakteristik utama dalam modal sosial menurut Putnam dalam Sudarmono 2021 ) adalah sebagai berikut.

- 1) Modal sosial memberikan dampak eksternal atau dapat disebut dimensi eksternalitas. Putnam mengungkapkan bahwa modal sosial bisa memberikan manfaat yang bersifat eksternal bagi seluruh komunitas di sekitarnya. Sifat eksternalitas ini juga dapat ditemukan dalam masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat. Meskipun demikian, eksternalitas dari modal sosial tidak selalu berdampak positif. “Eksternalitas modal sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif yaitu adanya penolakan atau pengecualian terhadap orang-orang baru yang berada di luar jaringan yang sudah terbangun lebih dahulu” (Putnam 2000: 21)
- 2) Modal sosial seringkali merupakan produk sampingan dari aktivitas sosial lainnya yang dilakukan oleh para pelaku untuk mencapai tujuan individu. Hal



ini berarti pelaku berinvestasi hanya melibatkan diri sebanyak yang dibutuhkan dalam menciptakan modal sosial untuk mencapai tujuan pribadi mereka.

- 3) Sebagian besar jenis modal sosial merupakan entitas moral yang dinamis. Kontribusi atau sumbangan dari setiap anggota ke dalam jaringan sosial mereka juga dapat berubah-ubah. Kontribusi mereka akan bertambah ketika intensitas penggunaan hubungan sosial meningkat.
- 4) Modal sosial dapat diatur secara formal maupun secara informal.
- 5) Hubungan modal sosial dapat terjalin rapat, berulang dan intensif.

Dalam mengembangkan konsep modal sosial yang melibatkan hubungan di dalam dan di luar suatu jaringan, Putnam memisahkan antara dua jenis modal sosial, yaitu modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*) dan modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*). Adapun poin-poin peran *bridging social capital* dan *bonding social capital* dari teori Putnam (2000) dalam Sudarmono (2021) adalah sebagai berikut.

- 1) Modal sosial yang bersifat menjembatani akan menghubungkan individu yang memiliki perbedaan yang signifikan, sementara modal sosial yang bersifat mengikat akan mengaitkan individu yang memiliki kesamaan.
- 2) Modal sosial yang bersifat menjembatani lebih terlihat ketika berperan dalam menghubungkan individu dari kelas sosial yang berbeda, sementara modal sosial yang bersifat mengikat dapat ditemui.
- 3) Modal sosial yang bersifat menjembatani bisa digunakan untuk mengaitkan manfaat yang berasal dari luar lingkungan dan menjaga kelancaran arus

informasi, sementara modal sosial yang bersifat mengikat dapat membantu dalam menggerakkan timbal balik dan solidaritas.

- 4) Modal sosial yang bersifat menjembatani menciptakan identitas yang beragam dan hubungan timbal balik, sementara modal sosial yang bersifat mengikat memperkuat dirinya sendiri. Modal sosial yang bersifat mengikat seperti ini dapat menyebabkan dampak negatif yang melibatkan faktor eksternal. Namun, dalam situasi khusus, “kedua bentuk modal sosial memiliki efek positif yang kuat” (Putnam, 2000 dalam Sudarmono, 2021).

Dari penjelasan di atas mengenai modal sosial dalam pandangan Putnam melibatkan hubungan antarindividu dan terbentuk dari keterlibatan sosial dengan norma-norma tertentu. Putnam menyoroti elemen-elemen seperti kepercayaan, jaringan keterlibatan sipil, dan norma timbal balik. Kepercayaan dianggap sebagai elemen utama yang memperluas jaringan sosial, meningkatkan peluang kerjasama positif. Jaringan keterlibatan sipil berfungsi sebagai penghubung dalam masyarakat, memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan baik. Norma timbal balik menciptakan kepercayaan sosial dan mempermudah kerjasama. Dalam konsep Putnam, terdapat modal sosial yang menjembatani dan mengikat. Modal sosial yang menjembatani menghubungkan individu yang berbeda, sedangkan yang mengikat mengaitkan individu yang mirip. Dalam kesimpulannya, Putnam melihat modal sosial sebagai entitas moral yang terbentuk dari hubungan keterlibatan sosial dan memiliki dampak eksternalitas yang dapat bersifat positif atau negatif tergantung situasinya.

#### d. Teori Modal Sosial Menurut Pandangan Fukuyama

Francis Fukuyama merupakan seorang pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang yang lahir di Chicago. Menurut Francis Fukuyama, modal sosial dapat diinterpretasikan sebagai jaringan sosial yang berkembang dan memiliki keterkaitan yang erat dengan norma-norma informal. Norma-norma yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah modal sosial yang berkisar pada hubungan timbak balik (*norm of reciprocity*). “Modal sosial adalah kondisi di mana sekelompok orang menggunakan sejumlah nilai atau norma-norma informal tertentu secara bersama-sama, memungkinkan terbentuknya kerjasama di antara mereka” (Fukuyama, 1995 dalam Sudarmono, 2021). Pandangan Fukuyama terhadap modal sosial juga dituangkan oleh Hasbullah (2006) dalam bukunya yang berjudul *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)* yang menekankan modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Fukuyama (1999) dalam Sudarmono (2021) merumuskan modal sosial sebagai instrumen yang menunjukkan rangkaian norma informal, dimana rangkaian tersebut diperkuat oleh adanya beberapa nilai (*values*). Secara sederhana, keempat nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) universalitas merupakan nilai tentang apresiasi terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengabaikan faktor-faktor agama, ras dan perbedaan yang bersifat fundamental;

- 2) *benevolence* merupakan nilai tentang upaya membantu orang dalam meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup manusia sebagai makhluk ekonomi;
- 3) *tradition* merupakan nilai yang mengandung penghargaan atas perbedaan tradisi dan budaya tradisional yang mungkin berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya;
- 4) *conformity* merupakan nilai yang berkaitan dengan upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain, termasuk di dalamnya hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa, hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dalam pergaulan serta upaya untuk senantiasa menjaga stabilitas lingkungan social (sumber: diolah Ancok, 2003 dalam Sudarmono, 2021)

Dengan mencermati pandangan Fukuyama di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial sebagai kumpulan nilai dan norma-norma informal yang digunakan bersama oleh anggota kelompok, meningkatkan kualitas kerjasama dalam hubungan antar individu atau kelompok yang berjejaring. Fukuyama juga menyederhanakan konsep modal sosial dengan 4 (empat) komponen utama: universalitas, *benevolence*, *tradition*, dan *conformity*. Dari keseluruhan komponen tersebut modal sosial instrumen yang mencerminkan rangkaian norma informal, yang diperkuat oleh nilai-nilai.

## 2. Dimensi Modal Sosial

Nahapiet dan Ghoshal (1998) dalam Sayuti (2016) menguraikan tiga dimensi modal sosial, meliputi: dimensi kognitif, dimensi struktural dan dimensi relasional. Berikut uraian penjelasan mengenai dimensi modal sosial tersebut.

- a. Dimensi kognitif modal sosial. Dimensi ini mencakup banyak individu yang berpartisipasi dalam jaringan sosial dengan pandangan atau persepsi yang sama. (Bolino, 2002 dalam Sayuti, 2016). Terkait dengan komunikasi antar individu dalam suatu kelompok atau komunitas, melibatkan unsur-unsur seperti penggunaan kode dan bahasa umum, serta berbagi narasi umum (Nahapiet, 1998 dalam Sayuti, 2016). Nahapiet dan Ghoshal (1998) mendefinisikan dimensi kognitif sebagai sumber daya menyediakan keinginan umum di antara bagian-bagian yang berbeda (Watson, 2002 dalam Sayuti, 2016). Aspek ini dianggap sebagai sumber yang memberikan interpretasi bersama untuk kelompok yang beragam. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa tujuan umum dan pengembangan nilai-nilai muncul melalui partisipasi yang berkelanjutan dalam proses semantik karena kelompok yang berbeda menghasilkan persepsi bersama (Krause et al, 2007 dalam Sayuti, 2016).
- b. Dimensi struktural dalam modal sosial mencakup hubungan antara aktor yang secara berulang membagi informasi. Menurut Nahapiet dan Ghoshal (1998) dalam Sayuti (2016) berpendapat bahwa akses terhadap informasi ini dapat meningkatkan kemampuan kelompok atau komunitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyelesaikan pengetahuan dan masalah. Dimensi struktural ini mencakup model hubungan antara jaringan, struktur pengelompokan jaringan, dan proporsi pengelompokan (Nahapiet, 1998 dalam Sayuti, 2016).
- c. Dimensi relasional dalam modal sosial mencakup sifat hubungan di dalam suatu kelompok atau komunitas. Dengan kata lain, dimensi ini fokus pada sifat

dan kualitas komunikasi di dalam kelompok atau komunitas (Bolino, 2002 dalam Sayuti, 2016). Aspek-aspek yang terlibat dalam dimensi ini mencakup kepercayaan, norma, kewajiban, dan identifikasi (Nahapiet, 1998 dalam Sayuti, 2016). Nahapiet dan Ghoshal menyatakan bahwa pertukaran dan kombinasi pengetahuan dapat lebih lancar terjadi dalam komunitas atau kelompok ketika individu-individu berkomunikasi satu sama lain (modal struktural), memiliki hubungan interpersonal (modal relasional), dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki.

### 3. Tipe Modal Sosial

Tipe atau bentuk jaringan sosial pada modal sosial oleh Putman diperkenalkan perbedaan dua bentuk dasar modal sosial, yaitu mengikat (*bonding*) dan menjembatani (*bridging*). Sedangkan Woolcock (1998) membedakan modal sosial kedalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut.

- a. *Bonding social capital, which denotes ties between like people in similar situations, such as immediate family, close friends and neighbours* (Bonding adalah ikatan perasaan diantara orang-orang yang ada dalam situasi yang sama, semisal ikatan keluarga, kawan karib, dan ketetanggaan).
- b. *Bridging social capital, which encompasses more distant ties of like persons, such as loose friendships and workmates* (Bridging adalah ikatan modal sosial yang lebih luas dan lebih longgar, seperti pertemanan dan rekan kerja).
- c. *Linking social capital, which reaches out to unlike people in dissimilar situations, such as those who are entirely outside the community, thus enabling members to leverage a far wider range of resources than are*

*available within the community* (linking adalah ikatan modal sosial yang anggotanya dari beragam latar belakang, semisal satu komunitas dengan pihak luar, dan ikatan yang demikian akan memungkinkan kita bisa mengakses beragam sumber untuk kepentingan komunitas) (Field, 2008 dalam Sunoto, 2014)

*Social Bonding* merupakan tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan dalam keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain, yang mungkin masih berada dalam satu etnis. Hubungan kekerabatan ini bisa menumbuhkan rasa kebersamaan yang diwujudkan melalui rasa empati, rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik, nilai kebudayaan yang mereka percaya. *Social bonding* seperti yang dikemukakan Hasbullah (2006) dalam Harge (2016) dibagi lagi kedalam beberapa bentuk dengan karakter pembeda seperti penerapan alternatif pilihan untuk melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk tersebut berupa spektrum yang terdiri dari tiga bentuk yaitu *sacred society*, *heterodoxy* dan *orthodoxy*.

*Social bridging* (jembatan sosial) ikatan yang muncul sebagai reaksi terhadap berbagai perbedaan karakteristik dalam kelompok.. *Bridging social capital* memiliki dua aspek yaitu *structural bridging social capital* dan *cognitive bridging social capital*. Dalam *Structural bridging social capital* terdapat identitas dan status (Lancee, 2012 dalam Tresna,2023). Identitas dalam *structural bridging social capital* merujuk pada hubungan yang melintasi perbedaan horizontal yang ditentukan secara budaya, seperti identitas etnis dan asal daerah, atau dalam konteks

organisasi, dapat berupa perbedaan budaya organisasi (Lancee, 2012 dalam Tresna, 2023). Sedangkan status dalam *bridging social capital* mengacu pada hubungan vertikal. Status *bridging social capital* memberikan peluang bagi individu yang kurang berpengaruh untuk memperoleh pengaruh dan sumber daya lainnya melalui hubungan mereka dengan individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang memiliki status lebih tinggi (Tresna, 2023).

Adapun *cognitive bridging social capital* berhubungan dengan kepercayaan yang ada pada *bridging social capital* (Lance, 2012 dalam Tresna, 2023). Komponen kepercayaan dalam *cognitive bridging social capital* meliputi: (1) dukungan yang diberikan secara sukarela oleh setiap pihak berdasarkan hubungan yang erat, (2) hubungan timbal balik di mana semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat atau risiko, (3) keyakinan terhadap kemampuan internal dan eksternal dalam mengelola kerja sama serta meningkatkan akses ke sumber daya (Tresna, 2023).

#### 4. Unsur Pembentuk Modal Sosial

Hasbullah (2006) menyatakan ada 6 unsur pokok dalam modal sosial adalah sebagai berikut.

- a. Partisipasi dalam suatu jaringan (*Participation in a network*). Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan, dan keadaban.



- b. *Reciprocity* (timbang balik). Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
- c. Kepercayaan (*trust*). Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.
- d. Norma sosial (*social norms*). Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat.
- e. Nilai-nilai (*values*). Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku.
- f. Tindakan proaktif (*proactive action*). Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

### 2.1.2 Tinjauan mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal

#### 1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Blakely and Bradshaw (1994) dalam Susanti, dkk (2013), Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Munir (2007) dalam Susanti, dkk (2013), Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan- kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya kebijakan “*endogenous development*” yaitu mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. (Koesworo, 2008 dalam Haryati, 2009).

Dengan demikian PEL pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

#### 2. Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Habib (2012) dalam Haryati (2010) dalam penerapannya pengembangan ekonomi lokal memiliki beberapa hal yang menjadi fokusnya Pengembangan Ekonomi Lokal berfokus pada hal – hal sebagai berikut: a. peningkatan kandungan lokal; b. pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam

suatu kemitraan startegis; c. peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; d. pembangunan berkelanjutan; e. pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; f. pengembangan usaha kecil dan menengah; g. pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; h. penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; i. pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor, dan antar daerah; j. pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk meningkatkan nilai dari masyarakat dan wilayah, serta memberdayakan orang-orang lokal, industri lokal dan pemerintah lokal. Mengutip dari Haryati (2010) terdapat beberapa tujuan PEL adalah sebagai berikut: a. terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif; b. terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis; c. terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal; d. terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) secara ekonomis dan berkelanjutan; e. terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah dan *Product Domestic Regional Bruto* (PDB); f. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan; g. terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah; h. terciptanya ketahanan dan

kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Apapun bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif.

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan ekonomi lokal karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik bidang *capital* atau modal, Sumber Daya Manusia (SDM), ataupun bidang manajemennya. Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya yaitu masyarakat dan sektor privat (swasta).

#### 4. Kriteria Pengembangan Ekonomi Lokal

Adapun kriteria-kriteria dari ekonomi lokal menurut Blakley (1987) dalam Witjaksono (2017) antara lain sebagai berikut :

##### a. Bahan Baku dan Sumber Daya Lokal

Bahan baku lokal merupakan bahan yang digunakan dalam sebuah proses membentuk suatu barang jadi. Dalam kriteria ini menjelaskan bahwa bahan baku yang diperoleh itu harus dihasilkan oleh masyarakat di sekitar wilayah industri. Sumber daya merupakan suatu input untuk dijadikan sebuah output melalui suatu proses atau transformasi/perubahan. Sumber daya secara umum dibagi 2 yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.

##### b. Dapat digerakan oleh penduduk lokal sesuai dengan kemampuan penduduk lokal yaitu kegiatan industri dalam menunjang ekonomi lokal digerakan sepenuhnya oleh penduduk lokal dengan menyesuaikan kemampuan penduduk

lokal yang ada.

- c. Pengusaha dan Tenaga Kerja Dominan merupakan Tenaga Kerja Lokal  
Kriteria ini mengharuskan baik pengusaha dan tenaga kerja harus dominan atau sebagian besar adalah penduduk lokal. Untuk menumbuh kembangkan perekonomian lokal, sumber daya manusia dalam sebuah industri harus berasal dari masyarakat lokal.
- d. Melibatkan Sebagian Besar Penduduk Lokal  
Dalam suatu proses kegiatan industri, masyarakat lokal dilibatkan didalamnya. Tidak hanya dalam prosesnya, masyarakat bisa ikut terlibat dalam hal lainnya, seperti dalam hal penyediaan bahan baku atau dalam hal memasarkan hasil produk industri. Keterkaitan antar industri dengan masyarakat menjadi penguat untuk meningkatkan perekonomian dikawasan tersebut. Tujuan dari keterkaitan tersebut untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dalamnya.
- e. Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja. Skala dalam pelayanan, baik dalam jumlah modal, produksi dan pemasaran yang lingkup pelayanannya masih kecil.
- f. Terdapat organisasi/kelompok kegiatan ekonomi  
Dalam suatu kawasan industri terdapat adanya organisasi atau kelompok untuk membantu kegiatan ekonomi. Organisasi atau kelompok kegiatan ekonomi tersebut merupakan organisasi yang memang terbentuk dari adanya kegiatan industri tersebut, untuk mendorong dan mengembangkan industri yang ada. Organisasi/kelompok ini bisa bersifat kelembagaan pemerintah atau swasta.

g. Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain

Adanya keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain dalam kegiatan industri. Keterkaitan ini harus ada dalam kegiatan industri, yaitu hubungan satu kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti dalam hal penyedia bahan baku, industri membutuhkan bahan baku dari luar industri, ini berarti adanya hubungan antara si penyedia bahan baku dengan industri.

h. Memunculkan Wiraswasta Baru

Memunculkan wiraswasta baru dalam pengertian kegiatan suatu industri dapat memunculkan usaha baru, baik dampak secara langsung atau tidak.

5. Indikator Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam melihat keberhasilan pengembangan ekonomi lokal tentu memerlukan beberapa indikator, yaitu: 1. perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2. perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3. keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; 4. keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Supriyadi, 2007 dalam Susanti,dkk, 2013).

### 2.1.3 Tinjauan mengenai Kewirausahaan

Mengutip dari Hastuti,dkk (2020), secara harfiah ‘wira’ artinya berani sedangkan ‘usaha’ adalah daya upaya. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang

selalu aktif atau kreatif berdaya, bercrepta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya.

Scarborough dan Zimmerer (1993) menyebutkan bahwa *“An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities.”* (Soedrajat, 2011 dalam Hastuti,dkk 2020). Scarborough dan Zimmerer (1993) menyebutkan bahwa wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya.,

Proses kewirausahaan juga meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001 dalam Hastuti,dkk, 2020). Kewirausahaan esensinya adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing.

#### 1. Pengertian Kewirausahaan

Mengutip Hastuti,dkk (2020) terdapat beberapa ahli yang lain menyebutkan beberapa pengertian terkait kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- a. Afif, (2011) menyebutkan bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk m enciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya (Leibenstein, 1968).
- b. Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif,

peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian (Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio)

- c. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya (Peter F. Drucker)

Dari definisi kewirausahaan di atas, dapat disimpulkan kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda, menggunakan upaya dan waktu yang diperlukan, mengambil risiko finansial, psikologis dan sosial yang menyertainya, serta menerima imbalan finansial dan kepuasan pribadi.

## 2. Tujuan Kewirausahaan

Mengutip dari Hastuti,dkk (2020) kewirausahaan memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki bisnis sendiri menawarkan kebebasan dan peluang bagi wirausahawan untuk mencapai tujuan hidup mereka.
- b. Untuk memberi peluang untuk melakukan perubahan. Semakin banyak wirausahawan yang memulai usahanya sendiri karena memanfaatkan peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting.



- c. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Seseorang yang memiliki usaha sendiri pada dasarnya memberinya kekuatan, kebangkitan spiritual dan membuatnya mengikuti minat atau hobinya.
- d. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Meskipun uang bukanlah daya tarik utama bagi wirausahawan di tahap awal, namun keuntungan dari bisnis merupakan sumber motivasi penting untuk memulai bisnis sendiri.
- e. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas usahanya. Pemilik usaha kecil atau pengusaha sering kali merupakan warga yang paling dihormati dan dipercaya di masyarakat.
- f. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Bagi seorang pemilik usaha kecil, berwirausaha bukanlah sekedar pekerjaan, namun mereka menyalurkan hobi dalam pekerjaan.

### 3. Karakteristik Wirausaha

Beberapa karakteristik yang melekat pada diri wirausahawan menurut Zimmerer, and Scarborough, (1998); Kuratko & Hoodgets, (2007) adalah sebagai berikut:

- a. *Desire for responsibility*. Pengusaha hebat merasa dirinya bertanggung jawab secara pribadi atas hasil usahanya. Mereka lebih mampu mengelola sumber daya mereka dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan mereka.
- b. *Tolerance for ambiguity*. Dalam berbisnis mau tidak mau mereka harus berinteraksi dengan orang lain baik itu karyawan, pelanggan, pemasok material, pemasok, distributor, masyarakat, dan peraturan resmi serta mampu menjaga dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

- c. *Vision*. Pengusaha sukses selalu mempunyai cita-cita, tujuan masa depan yang jelas dan harus dicapai secara terukur.
- d. *Tolerance for failurer*. Pengusaha yang terbiasa dengan kreativitas dan inovasi pasti akan mengalami kegagalan sesekali atau bahkan sering kali.
- e. *Internal locus of control*. Pengusaha hebat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Wirausahawan yang mampu mengelola dirinya akan mampu bertahan dalam dunia bisnis yang semakin kompleks.
- f. *Continuous Improvement*. Pengusaha sukses selalu bersikap positif, menghargai pengalaman, dan melakukan pengembangan berkelanjutan.
- g. *Preference for moderate risk*. Karakteristik wirausaha dalam menghadapi risiko dapat digolongkan menjadi 3 jenis karakteristik risiko, yaitu *risk averse* (orang yang suka mengambil risiko besar), *moderate risk* (orang yang suka mengambil risiko sedang), dan *risk averse* (orang yang suka mengambil risiko sedang). yang suka menghindari risiko). Pada umumnya pengusaha sukses mempunyai peluang untuk memilih risiko yang moderat dimana dalam pengambilan keputusan memerlukan pertimbangan yang matang.
- h. *Confidence in their ability to success*. Wirausahawan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dirinya untuk berhasil.
- i. *Desire for immediate feedback*. Persaingan ketat dalam dunia bisnis memerlukan pemikiran yang cerdas dan respon yang cepat terhadap perubahan.
- j. *High energy level*. Pengusaha biasanya memiliki energi yang cukup untuk menjalankan bisnisnya dengan risiko yang ditanggung sendiri.

- k. *Future orientation*. Keuntungan usaha yang tidak menentu mendorong pengusaha untuk selalu mencari peluang, menghargai waktu dan berorientasi pada masa depan.
- l. *Skill at organizing*. Memulai bisnis dari awal memerlukan kemampuan untuk mengatur sumber daya yang ada baik berupa sumber daya keuangan yang berwujud maupun tidak berwujud untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
- m. *High Commitment*. Disiplin kerja dan wirausaha pada umumnya membenamkan diri dalam kegiatan ini untuk mencapai tujuannya.
- n. *Flexibility*. Perubahan yang cepat dalam bisnis mengharuskan wirausahawan beradaptasi terhadap perubahan jika ingin terus sukses. (Mengutip dari Afif, 2011 dalam Hastuti,dkk 2020).

#### 4. Dimensi Kewirausahaan

Kewirausahaan memiliki beberapa dimensi. Adapun dimensi–dimensi kewirausahaan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2010) yang dikutip dari Hastuti,dkk (2020) di antaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Kualitas Dasar Kewirausahaan

Kualitas dasar kewirausahaan meliputi kualitas daya pikir, daya hati/qolbu dan daya fisik.

- 1) Kualitas daya pikir mempunyai dimensi sebagai berikut: berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir orisinal (baru/asli), berpikir divergen, berpikir evolusioner, berpikir inovatif, penciptaan produk dan jasa baru, berpikir yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain, berpikir sebab akibat)

berpikir, berpikir lateral, berpikir sistematis, berpikir sebagai agen perubahan, berpikir ke depan (berpikir futuristik), intuisi tinggi, berpikir maksimal, pengambilan keputusan cerdas, berpikir positif dan universalitas berpikir sangat tinggi.

- 2) Kualitas dasar daya hati kewirausahaan memiliki inisiatif diri yang tinggi, mempunyai keberanian moral untuk memperkenalkan hal-hal baru, proaktif, tidak hanya aktif tetapi hanya reaktif, berani mengambil risiko, berani tampil beda, mendorong perubahan, tidak mendukung pendirian, kemauan dan semangat motivasi yang sangat kuat untuk bergerak maju, bertanggung jawab, semangat kerja yang sangat tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, integritas yang tinggi, jangka panjang, gigih, sabar dan pantang menyerah, pekerja keras, sangat berdedikasi, mampu menggerakkan orang lain, memberikan yang terbaik, terus berkembang, siap belajar dari kesalahan, keberhasilan dan praktik yang baik untuk membangun secara tegas, cerdas, dinamis, harmonis dan lincah, percaya diri, menciptakan peluang, kompetitif namun berlandaskan nilai solidaritas, agresif/menyerang, kerjasama tim yang baik. humanis dan hangat dalam pergaulan, fokus pada tujuan akhir, bukan pada tujuan langsung, fleksibel dalam pergaulan, selalu menginginkan tantangan baru, selalu mengembangkan cita rasa yang indah melalui seni (musik, suara, tari, lukisan), mandiri namun mudah bergaul, tidak mau mencari kambing hitam, selalu berusaha menciptakan dan menambah nilai sumber daya, terbuka terhadap masukan, selalu mencari perubahan yang lebih baik

(meningkatkan/berkembang), tidak pernah puas, terus berinovasi dan berimprovisasi untuk perbaikan lebih lanjut dan berkeinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru.\

- 3) Adapun kualitas daya fisik memiliki karakteristik / dimensi sebagai berikut: menjaga kesehatan secara teratur, menjaga stamina/dimensi tubuh yang baik, mempunyai energi yang tinggi dan memanfaatkan kemampuan tubuh untuk kesehatan dan kehidupan yang bahagia.

b. Kualitas Instrumental Kewirausahaan

Kualitas instrumental kewirausahaan meliputi penguasaan disiplin tunggal (ekonomi, matematika, manajemen, dan lain-lain), multidisiplin (manajemen bisnis, ekonomi pertanian, psikologi industri, dan lain-lain) dan kewirausahaan lintas disiplin (lingkungan, kependudukan). dan seterusnya).

#### **2.1.4 Tinjauan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### 1. Pengertian UMKM

Menurut Tambunan (1993) dalam Effendy (2018) usaha kecil mikro menengah merupakan rumah usaha produk barang yang jumlah pekerjanya mencapai 1- 4 orang, memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan

anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. (Aufar, 2014 dalam Hidayat dkk, 2022)

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan

usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industry manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp.200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000). (Aufar, 2014 dalam Hidayat dkk, 2022)

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM merupakan usaha milik orang perorangan/pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan.

## 2. Kriteria Usaha Mikro

Dikutip Hidayat,dkk (2022) yang menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik usaha mikro dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- a. usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dari kriteria menurut undang-undang dapat dipahami bahwa usaha mikro mempunyai kriteria/ciri tertentu yang berarti usaha mikro mempunyai aset maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta

Menurut Diwayana (2023) usaha mikro memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut.

- a. Memiliki karyawan kurang dari empat orang
- b. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 juta
- c. Omset penjualan tahunan hingga Rp300 juta per tahunnya

d. Biasanya salah satu kriteria usaha mikro ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi.

Selain itu kriteria usaha mikro juga memiliki ciri-ciri tertentu yaitu belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk usahanya relatif kecil.

### 3. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Menurut Diwayana (2023) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang membedakannya usaha yang lain. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : a. jenis produk yang tidak ditetapkan; b. lokasi usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diubah sesuai kebutuhan; c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut biasanya tidak memiliki implementasi administrasi yang detail dan sesuai dengan industri besar ; d. UMKM dicirikan oleh jumlah orang yang sedikit dan biasanya pengelolaannya mudah, yakni sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam usaha tersebut belum mumpuni; e. tingkat pendidikan dari SDM yang ada relatif rendah; f. modal didapatkan dari non bank, padahal akan lebih baik dan legal jika modal bisa didapatkan dari bank atau kreditur; g. usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki izin usaha serta NPWP dan legalitas; h. belum memiliki sistem administrasi yang lengkap dan segi keuangan juga belum dibedakan mana yang pribadi dan mana yang usaha; i. lokasi usaha masih di daerah rumah dan kurang strategis; j. manajemen masih dilakukan secara sederhana; k. pegawai atau karyawan yang dimiliki masih sedikit mungkin 5 sampai 10 orang; l.



belum masuk dalam impor dan ekspor walaupun ada masih sangat sedikit; m. usaha yang dilakukan masih dalam cakupan yang kecil.

#### 4. Manfaat UMKM

UMKM memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar tidak hanya berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara tetapi menyerap tenaga kerja yang besar. Berikut manfaat UMKM sebagai berikut.

##### a. Manfaat bagi Masyarakat

Menurut Diwayana (2023) pemerintah telah melakukan berbagai penyuluhan dan bantuan terhadap perkembangan usaha kecil di Indonesia. Hal tersebut tentu dilakukan bukan tanpa tujuan. Ada berbagai manfaat UMKM yang menguntungkan bagi masyarakat hingga ekonomi negara, yaitu:

- 1) sarana mensejahterakan masyarakat;
- 2) upaya pemerataan ekonomi rakyat;
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 4) sebagai sumber devisa negara;
- 5) sarana mensejahterakan masyarakat.

Lazimnya sebagai aktivitas ekonomi, UMKM akan memberi keuntungan finansial bagi pemiliknya. Namun, ternyata pengaruhnya tidak hanya sesederhana itu. Selain memberi kesejahteraan bagi individu pemilik, UMKM juga memberi pengaruh finansial yang positif bagi lingkungannya. UMKM dapat berdiri di semua daerah dan fleksibel mengikuti kebiasaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Kebutuhan masyarakat pun dapat terdistribusikan lebih merata. Tersebar

UMKM di seluruh provinsi di Indonesia terbukti mengurangi gap antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Peran UMKM dari sisi ini adalah memberi kesempatan produk daerah tertinggal dapat didistribusikan ke daerah sentral atau kota. Keberadaannya telah menekan banyak biaya teknis yang akhirnya membuat produk di daerah bisa sama dengan di kota atau daerah yang dekat dengan lokasi produksi. Selain itu, fleksibilitasnya dalam melakukan ekspansi juga berpotensi membuat UMKM dapat bertahan lama, bahkan berkembang besar.

b. Manfaat bagi Perekonomian Indonesia

Menurut Dwiyana (2023), selain berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, UMKM dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Berikut peran dan manfaat bagi perekonomian Indonesia:

1) Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat karena UMKM bisa ada di berbagai daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

2) Sarana Mengentaskan Kemiskinan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan untuk mengatasi tingkat kemiskinan di masyarakat, karena tingkat penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.

3) Sarana Pemasukan Devisa bagi Negara

UMKM akan menyumbang devisa bagi negara karena pasarnya dari level nasional hingga internasional.

UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam Dwiyanana, 2023).

#### 5. Upaya Pengembangan UMKM

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan UMKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. (Afifuddin, 2010 dalam Mihani dan Thomas, 2020). Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan (Hafsah, 2004 dalam Mihani dan Thomas, 2020).

Tahapan pengembangan usaha menurut Anogara, 2002 (dalam Mihani dan Thomas, 2020) adalah sebagai berikut.

##### a. Identifikasi peluang

- b. Merumuskan alternatif usaha
- c. Seleksi Alternatif
- d. Pelaksanaan alternatif terpilih
- e. Evaluasi

Jenis-jenis strategi pengembangan usaha Rangkuti, 2000 (dalam Mihani dan Thomas, 2020), sebagai berikut.

- a. Strategi pengembangan produk
- b. Strategi pengembangan pasar
- c. Strategi pengembangan yang terkonsentrasi
- d. Strategi Inovasi.

Upaya pengembangan UMKM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 4 dapat dilakukan melalui dua hal yakni fasilitasi pengembangan usaha, dan pelaksanaan pengembangan usaha. Terkait fasilitasi pengembangan usaha yakni dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan desain serta teknologi. Sedangkan pelaksanaan pengembangan dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2013 adalah melalui :

- a. Membuka peluang untuk dapat ikut serta dalam lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Membuka ruang usaha khusus bagi UMKM melalui pembatasan bagi

usaha besar pada bidang usaha tertentu;

- c. Memberikan kemudahan perizinan;
- d. Menyediakan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Mendukung penerapan teknologi informasi.

Sebagaimana Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.5 Modal Sosial dalam Pemberdayaan Sosial**

#### **1. Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris

“*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Eddy Ch. Papilaya (2002) mengemukakan pendapat bahwa pemberdayaan diistilahkan dengan kata “*empowerment*” adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007 dalam Nurdiana, dkk 2012). Mardikanto dan Soebiato (2012) dalam Hamid (2018) mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sosial mengemukakan pengertian pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan

untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuatan kepada kelompok yang lemah supaya bisa mandiri, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat sendiri. Ahli sepakat bahwa pemberdayaan melibatkan membangun kemampuan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun pemberdayaan sosial adalah usaha untuk membuat individu, keluarga, dan masyarakat yang punya masalah sosial agar lebih bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

## 2. Unsur-Unsur Pemberdayaan Sosial

Menurut Darwanto (2007) dalam Bahua (2015), unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya ada empat yaitu sebagai berikut.

### a. Inklusi dan Partisipasi

Inklusi fokus pada siapa yang diberdayakan. Sedangkan partisipasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

### b. Akses pada Informasi

Berbagai sarana yang memudahkan masyarakat, baik kemudahan menjalin hubungan dengan instansi yang dapat bekerja sama, informasi tentang pemerintah, informasi permintaan dan penawaran pasar dan lain sebagainya.

### c. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja kolektif, mengumpulkan berbagai sumber daya manusia yang ada untuk menyelesaikan berbagai masalah.

d. Profesionalitas Pelaku Pemberdayaan

Profesionalitas pelaku pemberdayaan adalah kemampuan para pemberdaya, baik pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) untuk memahami, mendengarkan, mendampingi dan melakukan berbagai upaya lainnya untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Langkah-Langkah Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004) tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui meliputi tahap berikut.

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diinvertensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik .

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar.



Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

c. Tahap Peningkatan Kemampuan.

Pada tahap ini berupaya untuk memberikan pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-keasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat secara mandiri melakukan pembangunan.

#### 4. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Sosial

Modal sosial dapat dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, dan memanfaatkan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maupun sosial. Relasi ini memiliki keterkaitan dengan norma yang memberikan jaminan nilai-nilai tentang kepercayaan, dan melembagakan hubungan saling menguntungkan. Modal sosial memiliki fokus analisis berupa kelompok hingga masyarakat (Usman, 2018 dalam

Subagyo, 2021). Hal ini disebabkan karena modal sosial hanya dapat bekerja apabila terdapat beberapa individu untuk menjalin relasi- relasi sosial.

Modal sosial sering dikaitkan dengan rasa saling percaya (trust), norma-norma, dan jejaring yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama (Fathy, 2019 dalam Subagyo, 2021). Penjelasan ini mengandung arti bahwa modal sosial dapat diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menemukan dan menyelesaikan masalah bersama. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ditandai dengan adanya upaya untuk meningkatkan akses pada informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas organisasi lokal dimana hal tersebut sangat berkaitan erat dengan elemen-elemen modal sosial.

Selain itu, modal sosial memiliki beberapa peran seperti memberikan akses terhadap informasi, berguna bagi mobilisasi dukungan, alat untuk menanamkan dan menebarkan kepercayaan, dan memunculkan hubungan saling menghargai melalui identitas yang jelas (Usman, 2018 dalam Subagyo,2021).

#### **2.1.6 Relevansi Praktik Pekerjaan Sosial dan Modal Sosial**

Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial (Lestari,dkk 2015)

“Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.” (Zastrow, 2004 dalam Lestari,dkk 2015)

Coleman (1999) dalam Cahyono (2014) mengemukakan bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Burt (1992) dalam Cahyono (2014) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Fukuyama (1995) dalam Cahyono (2014) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai- nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

Pengertian antara pekerjaan sosial dari Zastrow dan pengertian modal sosial dari para ahli di atas masih terdapat hubungan dan keterkaitan. Praktik pekerjaan sosial tidak hanya membantu individu, kelompok, komunitas, masyarakat namun menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian

tujuan itu. Untuk menunjang kondisi kemsyarakatan tersebut tentu dibutuhkan modal sosial seperti kepercayaan, nilai masyarakat, dan jaringan. Seperti pendapat Coleman bahwa modal sosial digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara jika pendapat Zastrow dan pendapat Burt dikaitkan maka saling berhubungan. Untuk menciptakan asosiasi sosial di masyarakat tentu dibutuhkan sustau jaringan dan kerjasama antara pekerja sosal dan masyarakat. Untuk menciptakan itu harus menumbuhkan nilai dari masyarakat itu sehingga pekerja sosial mampu untuk menciptakan keberfungsian sosial pada masyarakat. Adapun pendapat Zastrow dan Fukuyama pun saling berhubungan. Pekerja sosial tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas di masyarakat jika tidak ada jalinan kerjsama dan kepercayaan dari masyarakat. Jika pekerja sosial pada praktiknya tidak mampu mencipatakan nilai dan norma di masyarakat maka pekerja sosial akan sulit menjalankan tugas tugas sosial pada masyarakat.

#### 1. Modal Sosial dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Usaha mikro, kecil, dan menengah secara umum ditandai dengan lemahnya jaringan antar lembaga yang ada, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki persyaratan sosial yang cukup seperti pendidikan yang rendah, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan komunikasi yang baik. Modal sosial merupakan salah satu modal dasar yang selama ini kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, upaya penggunaan modal sosial dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah setempat.

Berkembangnya suatu perekonomian lokal tentunya kuncinya adalah terbentuknya modal sosial dari lembaga kelembagaan terlebih dahulu seperti

keluarga, budaya, dan kelompok paguyuban. Hal ini dinamakan *bonding social capital*. Disaat *bonding* ini ada dinatar lingkungan mereka pastinya timbul kepercayaan. Setelah kepercayaan ada, anggota akan menjembatani (*bridging social capital*) untuk menghubungkan pihak-pihak lain sehingga terjadinya jejaring sosial. Dari jejaring sosial ini dapat semakin luas ketika semakin kuat jejaring sosial di natar anggota komunitas tersebut sehingga pihak luar dengan strata yang berbeda beda dapat menjalin relasi sosial dengan komunitas tersebut maka terjadilah *linking social capital*. Semakin banyak dan luas jejaring sosial, relasi sosial, komunikasi dan kepercayaan maka ekonomi lokal pada wilayah tersebut akan semkin berkembang atau dapat juag maju ekonomi lokalnya.

Dalam pengembangan UMKM tentu dapat melibatkan pekerja sosial profesional sebagai agen perubahan. Proses pemberdayaan membutuhkan tahapan yang harus dijalani karena dianggap sebagai langkah-langkah bertahap untuk meningkatkan kemandirian masyarakat (Winarni, 1998 dalam Muhyidin, 2019). Muhyidin (2019) menguraikan tahapan pemberdayaan dalam pengembangan UMKM sebagai berikut.

a. Tahap Pemungkinan

Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi masyarakat UMKM bisa berkembang dengan baik. Mereka juga memotivasi individu dan kelompok untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola usaha.

b. Tahap Penguatan

Tujuan tahap ini adalah memberikan penguatan dan perbaikan kepada UMKM yang menjadi fokus pemberdayaan. Pekerja sosial membantu memperkuat pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga memberikan dorongan dan motivasi kepada UMKM yang membutuhkan.

c. Tahap Perlindungan

Pada tahap ini, pekerja sosial berperan sebagai advokat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat UMKM tentang pentingnya kewirausahaan sosial, peluang dan risiko bisnis, serta persiapan yang diperlukan untuk menjadi wirausahawan. Mereka juga menghubungkan UMKM dengan sumber daya yang tersedia, memberikan fasilitas interaksi, dan mendistribusikan sumber daya material.

d. Tahap Pemeliharaan

Pekerja sosial berperan sebagai evaluator bersama masyarakat UMKM untuk mengevaluasi kemajuan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Mereka membantu menetapkan ukuran keberhasilan, menilai kemajuan kegiatan, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menjaga kelangsungan program tersebut.

Dengan melalui tahapan-tahapan ini, pekerja sosial profesional dapat membantu dalam proses pemberdayaan dan pengembangan UMKM secara efektif.

## 2. Modal Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Wibhawa et al. (2017) dalam Apriandira,dkk (2022) menggambarkan pekerjaan sosial sebagai bidang keahlian dengan kewenangan melaksanakan

sejumlah upaya untuk meningkatkan kapabilitas seseorang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melewati proses interaksi, agar seseorang tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi hidupnya. Dalam menjalankan upaya tersebut, seorang pekerja sosial memiliki peranan yang bervariasi sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Berdasarkan Wibhawa et al. (2017) dalam Apriliandra,dkk (2022) terdapat beberapa aspek yang menentukan peran pekerja sosial profesional, seperti:

- a. pendekatan dualistis yang digunakan dalam pekerjaan sosial yang melihat perubahan dan perkembangan personal dan perubahan serta perkembangan sosial sebagai satu kesatuan;
- b. fungsi-fungsi dalam praktik pekerjaan sosial yang saling berkaitan seperti pencegahan, analisis, perumusan kebijakan, program serta pelayanan kesejahteraan sosial.

Netting (2001) dalam Ocktilia (2020) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas (makro) merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas.

Dalam praktik pekerjaan sosial makro terdapat metode praktik pekerjaan sosial yang lebih dikenal dengan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)*. Salah satu model dari metode CO/CD adalah *locality development/community development* (pengembangan masyarakat). Christenson & Robison (1989) dalam Alfitri (2011) menjelaskan bahwa *community development* suatu proses, masyarakat yang tinggal di lokasi tertentu mengembangkan prakasra untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan.

Pengembangan serta pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan, organisasi, dan implementasi berbagai program dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemampuan mandiri masyarakat secara ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan aparat desa diutamakan. Modal sosial memegang peran penting dalam proses pengembangan masyarakat sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks masyarakat, kekuatan hubungan antar individu dan kelompok menentukan nilai dari modal sosial. Penggunaan modal sosial sebagai alat penilaian utama berguna untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan dan partisipasi dalam komunitas. Keberhasilan implementasi kebijakan sosial dan program-program tertentu dapat diprediksi dari tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Jika terdapat kurangnya kepercayaan dan partisipasi, maka diperlukan tindakan intervensi sosial atau program-program khusus untuk meningkatkan rasa kepercayaan dalam masyarakat.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017), dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial komunitas dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti: a. melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat, masalah yang ada, dan sumber daya yang dapat dimaksimalkan untuk membantu penyelesaian masalah masyarakat; b. mengajukan perencanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. memaksimalkan kapabilitas masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya dan resolusi permasalahan; d. membangun koneksi antara masyarakat dengan sumber- sumber kesejahteraan sosial yang ada; e. memberikan informasi tentang sumber-sumber kesejahteraan sosial yang dapat



dijangkau serta hal-hal yang diperlukan dalam memperolehnya; f. berkontribusi bagi perubahan masyarakat. Dan seluruh hal ini tidak terlepas dari peran modal sosial dalam pengembangan masyarakat tersebut (Apriliandra,dkk 2022).

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa pekerjaan sosial komunitas (makro) merupakan bidang yang luas dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat. Pekerjaan sosial komunitas, khususnya dalam pengembangan masyarakat, sering kali menggunakan Metode Pengembangan Masyarakat (CO/CD) dengan berbagai pendekatan, baik profesional maupun radikal. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pekerja sosial komunitas dengan melakukan pendataan kebutuhan masyarakat, perencanaan program yang sesuai, memaksimalkan kapabilitas masyarakat, membangun koneksi dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial, memberikan informasi tentang sumber-sumber kesejahteraan sosial, dan berkontribusi pada perubahan masyarakat. Semua langkah ini sangat bergantung pada peran modal sosial dalam mengembangkan masyarakat. Dengan demikian, pekerjaan sosial merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan peran serta masyarakat dalam prosesnya serta memanfaatkan modal sosial sebagai salah satu faktor kunci dalam pencapaian keberhasilan.